

BAB II

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Literatur

2.1.1. Teori Atribusi

2.1.1.1. Pengertian Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang merujuk tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari perilaku dirinya sendiri atau orang lain (Luthans, 2011). Menurut Heider (1958), teori atribusi adalah teori yang menekankan tentang bagaimana individu menafsirkan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan faktor internal dari individu tersebut, seperti sikap, watak, sikap, dan sebagainya serta faktor eksternal seperti tekanan dari luar yang sedang dialami seseorang. Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah teori yang memaparkan bagaimana pendapat individu terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dipengaruhi dari internal individu maupun lingkungan eksternal dari individu tersebut.

Teori ini sesuai dengan penelitian ini karena penelitian ini mengkaji mengenai faktor – faktor yang diduga dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Melalui teori ini, penulis dapat memperkirakan dan mendalami bagaimana auditor dapat menafsirkan pendapatnya dalam mendeteksi *fraud* apabila dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari individu tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin lebih menekankan pada faktor internal dari auditor yaitu skeptisisme profesional, independensi, dan objektivitas. Teori atribusi mengasumsikan bahwasanya adalah suatu proses pembentukan kesan. Penyebab dari seseorang melakukan sesuatu itulah yang membentuk kesan yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai faktor yang memengaruhi tindakan pihak lain.

2.1.1.2. Faktor Teori Atribusi

Menurut Robbins & Judge (2008) dalam Purnaditya & Rohman (2015), terdapat tiga faktor yang dapat membantu menentukan apakah suatu perilaku disebabkan secara internal atau eksternal:

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada perilaku yang ditunjukkan individu secara berbeda jika diperhadapkan pada situasi yang berbeda. Jika perilaku tersebut dianggap normal, hal itu mungkin berasal dari faktor internal. Begitu pun sebaliknya, apabila perilaku itu dianggap tidak normal, maka kemungkinan disebabkan dari faktor eksternal.

2. Konsensus

Konsensus adalah ketika setiap orang yang telah melalui situasi yang sama bereaksi dengan cara yang sama. Jika konsensus rendah maka perilaku tersebut dipicu oleh faktor internal. Begitu pun sebaliknya, jika konsensus tinggi maka perilaku tersebut dipicu oleh faktor eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi adalah ketika individu selalu merespon dengan cara yang sama. Semakin konsisten tindakannya maka hal tersebut dipicu oleh faktor internal. Begitu pun sebaliknya, semakin tidak konsisten maka tindakan tersebut dipicu oleh faktor eksternal.

Ketiga faktor yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan faktor – faktor yang berasal dari luar diri individu. Apabila ketiga faktor tersebut terpenuhi maka terjadi atribusi eksternal. Sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka terjadi atribusi internal.

2.1.2. Teori Konsistensi Kognitif

2.1.2.1. Pengertian Teori Konsistensi Kognitif

Menurut Petri & Govern (2013), teori konsistensi kognitif adalah suatu keadaan di mana individu akan berusaha mengoptimalkan sikap, keyakinan, pikiran, dan perilakunya. Teori konsistensi kognitif adalah suatu teori yang membahas mengenai preferensi setiap pribadi mengenai keseimbangan aspek kognitif, seperti keyakinan, pemikiran, sikap, pengetahuan, pendapat, dan niat (Baumeister & Vohs, 2007). Berdasarkan kedua definisi ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori konsistensi kognitif adalah suatu teori yang menyatakan sebuah keadaan yang dialami individu di mana individu tersebut akan berusaha mengoptimalkan dan menyeimbangkan aspek kognitifnya.

2.1.2.2. Jenis Teori Konsistensi Kognitif

Menurut Larson (1986), jenis-jenis teori konsistensi kognitif adalah sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan atau *balance theory* digagas oleh Fritz Heider tahun 1946 yang menekankan pada keterlibatan dua orang dalam topik yang sama. Idennya adalah penerima harus secara aktif berhadapan dengan komunikator, dan komunikator harus menyampaikan hubungan yang berbeda dengan subjek yang dipegang oleh penerima. Hal ini akan menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak stabil yang harus diselesaikan dengan berbagai cara. Penerima mengubah sikap atau perilaku terhadap topik yang dibawa oleh atau kepada komunikator.

2. Teori Kesesuaian

Teori kesesuaian atau *congruency theory* menekankan dua set informasi atau dua konsep yang membutuhkan seorang pengamat untuk membuat penilaian. Jika kedua kumpulan informasi atau konsep itu sama atau sesuai, maka ini bukan masalah. Sebaliknya, jika dua kumpulan informasi atau konsep tidak

identik, pengamat akan berada di bawah tekanan untuk mengubah penilaiannya terhadap salah satu kasus.

3. Teori Disonansi Kognitif

Teori disonansi kognitif digagas oleh Leon Festinger pada tahun 1957 yang menekankan pada konsekuensi dari ketidakkonsistenan antara dua kognisi terkait. Disonansi terjadi ketika elemen kognitif menjadi tidak konsisten secara logis dan psikologis. Situasi ini memotivasi individu untuk mengurangi disonansi dan memulihkan harmoni dengan menghindari situasi atau informasi yang dapat meningkatkan disonansi.

4. Teori Hierarki Keyakinan

Teori menekankan gagasan atau persepsi tentang ketidakkonsistenan dan kompleksitas perubahan sikap, keyakinan, dan perilaku manusia. Teori hierarki keyakinan menyatakan bahwa sikap, keyakinan, dan nilai saling terkait dan tersusun dalam hierarki yang berbeda (dari yang paling kecil hingga yang paling penting) menjadi satu sistem kepercayaan yang disajikan secara persuasif oleh penerimanya. Keyakinan dan sikap dapat memengaruhi tindakan kita, tetapi nilai memandu tindakan kita, jadi nilai adalah bagian terpenting dari segitiga sikap-keyakinan-nilai.

2.1.3. Teori *Fraud*

2.1.3.1. Pengertian *Fraud*

Penipuan, kerahasiaan, ataupun pelanggaran kepercayaan yakni ciri-ciri *fraud*. Mereka yang melakukan *fraud* melakukannya untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk mencegah hilangnya pendapatan ataupun jasa (Tuanakotta, 2013). Badan Pemeriksa Keuangan (2007) mendefinisikan *fraud* sebagai setiap tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum melalui penggunaan penipuan. Semua aspek *fraud*, termasuk ketidakjujuran, niat, dan penipuan, diilustrasikan dengan definisi yang diberikan di

atas. Dengan definisi ini, harus jelas bahwasanya *fraud* mencakup aktivitas apa pun yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan finansial melalui penipuan.

Penipuan akuntansi dianggap sebagai kejahatan "kerah putih" di bawah sistem peradilan pidana. Geis & Meier dalam Udayani & Sari (2017) menyatakan *white collar crime* dalam bisnis meliputi manipulasi pasar keuangan, penyuapan dalam bisnis, penyuapan otoritas publik, dan penerimaan suap. Kecurangan akuntansi, sebagaimana diungkapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2012) terlihat seperti ini:

1. Penghilangan yang disengaja ataupun pengungkapan yang menyesatkan pada laporan keuangan yang berkontribusi terhadap salah saji material
2. Laporan keuangan yang tidak dibuat sesuai dengan PABU memiliki jumlah yang tidak benar karena penggelapan ataupun penyelewengan dana perusahaan.

2.1.3.2. *Fraud Tree*

Tiga jenis utama penipuan yakni korupsi, penggelapan aset, dan akun penipuan (sering disebut *Fraud Tree*).

1) Korupsi (*Corruption*)

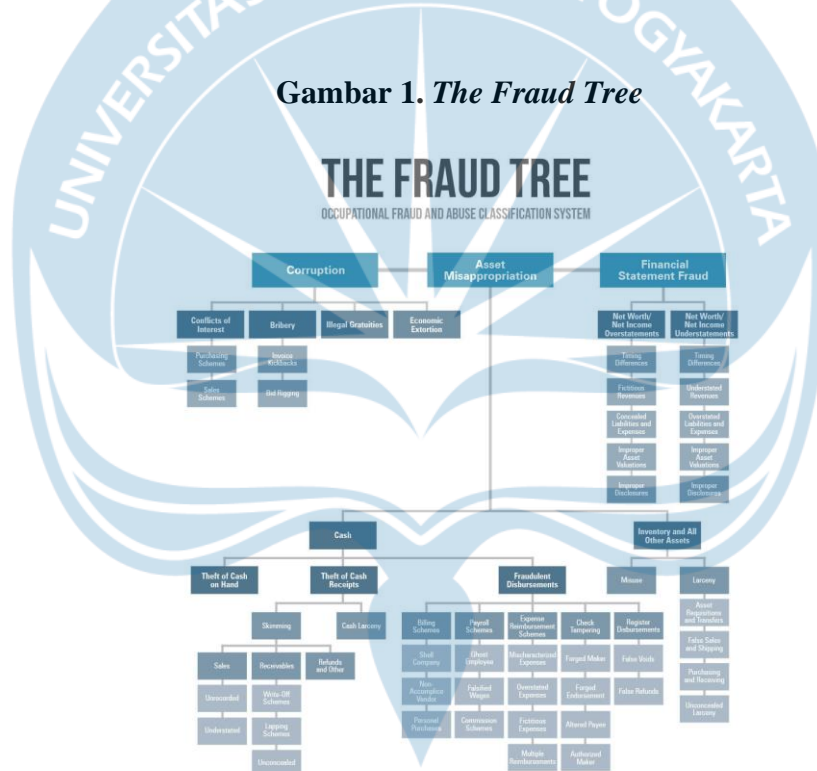
Korupsi dibagi menjadi konflik kepentingan, penyuapan, keuntungan ilegal, dan pemerasan ekonomi (ACFE, 2000). Dalam *fraud tree*, korupsi dikategorikan di bawah cabang benturan kepentingan, penyuapan, keuntungan yang tidak diminta, dan pemerasan ekonomi. Korupsi merupakan penipuan yang paling sulit dideteksi.

2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset yakni jenis penipuan yang mudah dideteksi karena terukur dan nyata. Berlandaskan pohon penipuan, penyalahgunaan aset dibagi menjadi dua jenis penipuan: penggelapan uang tunai dan inventaris dan penggelapan aset lainnya. Penggelapan aset berupa penggelapan kas terdiri dari tiga kategori ialah pencurian persediaan kas, pencurian penerimaan kas, dan penipuan penarikan.

3) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Tujuan audit, yang merupakan aspek integral dari mekanisme pelaporan keuangan, yakni untuk memberikan kepastian mengenai tanggung jawab manajemen dengan menentukan apa laporan keuangan sudah terbebas dari salah saji ataupun tidak. Mekanisme *misstatement* datang dalam dua bentuk: kesalahan dan penipuan. Menurut standar auditing, Salah satu perbedaan utama di antara penipuan dan kesalahan yakni apakah yang pertama disengaja ataupun tidak disengaja (Ikatan Akuntan Indonesia, 1993)



Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (2018)

2.1.4. Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud

Anggriawan (2014) menyatakan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kemampuan atau keahlian auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan mengandung kecurangan. Gizta (2020) memberikan

pendapat mengenai definisi kemampuan auditor mendeteksi *fraud* yaitu kemampuan auditor untuk mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan dan mengembangkan pencarian informasi. Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan auditor mendeteksi *fraud* adalah kemampuan auditor untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi terjadinya kecurangan, kemudian mengembangkan informasi tersebut.

2.1.5. Skeptisisme Profesional

2.1.5.1. Pengertian Skeptisisme Profesional

Menurut Standar Audit 200, skeptisisme profesional adalah suatu sikap untuk selalu waspada dan mempertanyakan kondisi yang kemungkinan terdapat kesalahsajian. *International Auditing and Assurance Standards Board* (2012) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap yang kritis selalu bertanya – tanya (*questioning mind*), kewaspadaan (*alert*) terhadap keadaan dan kondisi yang menunjukkan kemungkinan salah saji material, baik karena kesalahan atau kecurangan (*fraud*), dan evaluasi (*assessment*) bukti secara kritis. Berdasarkan kedua definisi yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang kritis untuk terus waspada dan selalu mempertanyakan akan apa yang sedang dihadapinya agar terkumpul bukti – bukti yang relevan dan terpercaya.

2.1.5.2. Unsur – Unsur Skeptisisme Profesional

Menurut Tuanakotta (2012), unsur – unsur dari skeptisisme profesional berdasarkan definisi dari IFAC (*International Federation of Accountant*) sebagai berikut:

1. *A Critical Assessment*

Auditor memiliki pemikiran yang kritis dan tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang tidak ada dasarnya.

2. *With a Question Mind*

Auditor mempunyai pemikiran yang selalu mempertanyakan suatu hal agar terkumpul bukti-bukti yang mendukung.

3. *Of the Validity of Audit Evidence Obtained*
Unsur yang ketiga berkaitan dengan keabsahan dari bukti – bukti audit yang telah dikumpulkan.
4. *Allert to Audit Evidence That Contradicts*
Auditor akan selalu waspada terhadap bukti – bukti yang berlawanan.
5. *Brings Into Question the Reliability of Documents and Responses to Inquiries and Other Information*
Auditor harus selalu menanyakan mengenai keandalan dari dokumen, jawaban, dan informasi yang ada.
6. *Obtained from Management and Those Charged with Governance*
Unsur terakhir berkaitan dengan apa yang diperoleh dari manajemen yang berwenang.

2.1.5.3. Karakteristik Skeptisisme Profesional

Karakteristik skeptisisme profesional dikemukakan oleh Hurtt et al. (2010), di mana terdapat enam karakteristik sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan dan Pengujian Bukti (*Examination of Evidence*)**
 - a. *Questioning Mind*
Skeptisisme profesional pada dasarnya adalah sikap kewaspadaan dan keingintahuan akan suatu hal yang memungkinkan terjadi kecurangan. Auditor yang profesional akan selalu berpikir kritis dengan mempertanyakan sesuatu mengenai alasan dan pembuktian tentang keadaan yang sedang dihadapinya.
 - b. *Suspension of Judgement*
Suspension of judgement atau penangguhan dalam penilaian ini mengarah pada perilaku yang suka menunda untuk membuat kesimpulan audit sampai dengan bukti yang dibutuhkan terkumpul.

Karakteristik ini terbentuk oleh beberapa indikator, yaitu membutuhkan waktu dalam membuat suatu keputusan, tidak membuat keputusan sampai semua informasi diungkapkan, dan membutuhkan lebih banyak informasi.

c. *Search of Knowledge*

Perilaku skeptis seseorang didasari oleh rasa keingintahuan yang tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih yang dapat berguna untuk melakukan kegiatan audit. Dalam hal ini motivasi individu sangat berperan penting demi kesuksesan proses audit dari awal proses pencarian sampai dengan akhir pembuatan keputusan (Bailey et al., 2007). Karakteristik ini terbentuk oleh berbagai indikator, yaitu tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap, menyenangkan bila menemukan hal hal yang baru, dan lebih banyak mencari dan berusaha menemukan informasi informasi baru yang *up to date*.

2. Pertimbangan Aspek Manusia dan Pemahaman Penyedia Informasi

a. *Interpersonal Understanding*

Individu yang bersikap skeptis akan berusaha untuk saling memahami antar pribadi berkaitan dengan integritas, motivasi, tujuan dari sumber informasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui akurat tidaknya informasi yang diberikan. Karakteristik ini terdiri oleh beberapa indikator yaitu berusaha alasan mengapa seseorang berperilaku dan memahami perilaku orang lain.

3. Keberanian Profesional Auditor

a. *Self Confidence*

Auditor yang bersikap skeptis akan percaya pada kemampuan mereka sendiri dalam menanggapi dan memproses bukti yang telah

dikumpulkan. Auditor tersebut cenderung untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan secara mandiri dan tidak memercayai sugesti dari pihak lain yang diterimanya. Karakteristik ini terbentuk oleh beberapa indikator, yaitu kemampuan diri sendiri dan kepercayaan terhadap keterampilan diri sendiri.

b. *Self Determination*

Auditor yang bersikap sketis dapat memberikan kesimpulan terhadap sesuatu dengan objektif berdasarkan dari bukti yang telah dikumpulkan. Auditor tersebut memberikan keputusannya sendiri mengenai tingkat bukti yang dibutuhkan untuk menerima suatu hipotesis. Karakteristik ini terbentuk oleh beberapa indikator, yaitu menekankan sesuatu yang kontradiktif dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, memerhatikan penjelasan orang lain, dan tidak langsung membenarkan apa yang dikatakan orang lain.

2.1.6. Independensi

2.1.6.1. Pengertian Independensi

Menurut Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah, Indonesia, independensi adalah suatu kondisi dimana APIP terbebas dari keadaan yang dapat mengancam kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Menurut Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal, independensi adalah keadaan bebas dari hal yang bisa mengancam aktivitas auditor internal untuk tetap bersikap tidak memihak dalam melaksanakan tugas auditnya. Berdasarkan kedua pendapat ahli mengenai pendefinisian independensi maka dapat disimpulkan bahwa independensi adalah suatu keadaan dimana auditor internal dapat terbebas dari kondisi yang mengancam tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas auditnya.

2.1.6.2. Indikator Independensi

Indikator independensi auditor dikemukakan oleh Hartan (2016) sebagai berikut

1. *Independence in Fact* (Independensi Dalam Fakta)

Indikator independensi ini berarti auditor wajib mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi dalam melakukan seluruh proses audit.

2. *Independence in Appearance* (Independensi Dalam Penampilan)

Indikator independensi ini berarti auditor memiliki pandangan dari orang lain terhadap dirinya berkenaan dengan pelaksanaan auditnya. Auditor juga wajib menjaga kedudukannya agar pihak lain percaya akan sikap independensinya.

3. *Independence in Competence* (Independensi Dalam Keahlian)

Indikator independensi ini berkaitan dengan kemampuan auditor untuk melaksanakan dan menyelesaikan auditnya.

2.1.7. Objektivitas

2.1.7.1. Pengertian Objektivitas

Menurut Sawyer et al. (2006), objektivitas merupakan suatu keyakinan yang memberikan nilai terhadap pelayanan atau jasa seorang auditor dan merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi lainnya. Menurut Mulyadi (2002), objektivitas merupakan sikap mental yang harus dimiliki auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pihak lain mempengaruhi keputusan auditnya. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan kedua ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa objektivitas adalah suatu sikap yang harus dipertahankan seseorang agar tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam memberikan penilaiannya.

2.1.7.2. Indikator Objektivitas Auditor

Sukriah & dkk (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa indikator dari objektivitas auditor sebagai berikut:

1. Andal dan dapat dipercaya
2. Tidak merangkap sebagai panitia lelang, badan lain dan/atau tugas lain yang merupakan bagian dari tugas operasional pengawas
3. Tidak masuk tugas dengan maksud mencari orang lain
4. Mampu memenuhi kriteria dan praktik resmi
5. Membuat keputusan berdasarkan pemikiran logis dalam semua kegiatan.

2.1.8. Inspektorat Daerah

2.1.8.1. Pengertian Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah adalah badan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Inspektorat daerah tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu inspektorat daerah di tingkat provinsi dan inspektorat daerah di tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah melalui sekretaris daerah.

2.1.8.2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 3 Ayat 1, tugas dari inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah membantu pimpinan daerah dalam pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan dan pengurusan bersama badan-badan daerah di bawah yurisdiksi daerah. Pada ayat 2 dipaparkan fungsi inspektorat daerah, yaitu menyusun laporan hasil pengawasan, merumuskan suatu kebijakan secara teknis dan fasilitasi bidang pengawasan, melaksanakan administrasi instansi, mengawasi tugas pimpinan daerah, melaksanakan pengawasan kinerja dan keuangan internal melalui kegiatan pengawasan, seperti reuiu, audit, pemantauan, evaluasi, dan melaksanakan fungsi lainnya.

2.1.8.3. Peran Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 11, inspektorat daerah memiliki tiga peran sebagai berikut:

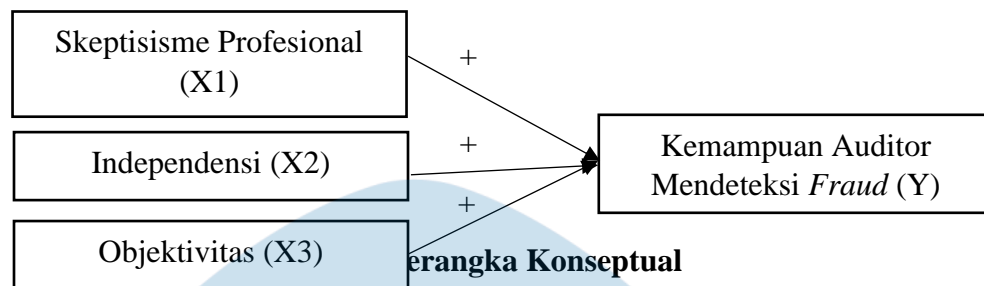
1. *Consulting/Problem Solver*
Auditor inspektorat memberikan jaminan yang cukup atas pemenuhan persyaratan, penghematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan tugas lembaga pemerintah.
2. *Early Warning*
Auditor inspektorat memperingatkan sejak dini adanya *fraud* yang dapat menimbulkan kerugian negara dan mengobati efektivitas penerapan manajemen risiko tugas serta tanggung jawab instansi pemerintah.
3. *Assurance/Penjamin Kualitas*
Auditor inspektorat mempertahankan dan meningkatkan kualitas manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban lembaga pemerintah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Solichin et al. (2021)	1. Skeptisisme Profesional	1. Kompetensi 2. Beban Kerja	1. Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi <i>fraud</i> .
2.	Septiawan & Fadjarenie, (2023)	2. Skeptisisme Profesional	1. Beban Kerja	1. Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi <i>fraud</i> .
3.	Anto et al. (2020)	1. Skeptisisme Profesional 2. Independensi	1. Beban Kerja	1. Skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi <i>fraud</i> . 2. Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi <i>fraud</i> .
4.	Bimantara & Ngumar (2018)	1. Independensi 2. Objektivitas	1. Pengalaman Pemeriksa	1. Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi <i>fraud</i> . 2. Objektivitas berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi <i>fraud</i> .
5.	Susilawati et al (2022)	1. Skeptisisme Profesional 2. Independensi	1. <i>Red Flags</i>	1. Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi <i>fraud</i> . 2. Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi <i>fraud</i> .

2.3. Kerangka Konseptual



2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud*

Menurut Standar Audit 200, skeptisisme profesional adalah suatu sikap untuk selalu waspada dan mempertanyakan kondisi yang kemungkinan terdapat kesalahsajian. Auditor internal yang skeptis secara profesional memiliki keinginan yang kuat untuk mencari informasi ketika ada bukti kecurangan (Fullerton & Durtschi, 2004). Seorang akuntan dengan kemampuan mendeteksi kecurangan yang baik lebih skeptis ketika melihat tanda-tanda kecurangan di sekitar mereka.

Teori hipotesis tersebut didukung oleh penelitian Solichin et al. (2021), Septiawan & Fadjarenie (2023), dan Agustina et al. (2021) yang menemukan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Jika auditor semakin kritis dan selalu waspada serta mempertanyakan untuk dapat mengumpulkan fakta yang relevan dan terpercaya maka akan semakin baik kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Berlandaskan penjelasan mengenai kompensasi di atas serta didukung adanya beberapa teori mengenai persepsi individu terhadap suatu objek tertentu dan hasil penelitian terdahulu, maka bisa dirumuskan hipotesis:

H1: Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*

2.4.2. Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud*

Menurut Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah, Indonesia, independensi adalah suatu kondisi dimana APIP terbebas dari keadaan yang dapat mengancam kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Auditor independen adalah orang yang membuat penilaian yang jujur tentang apa yang sedang diaudit dan tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, jika auditor sangat mendukung untuk mempertahankan sikap independensi maka sikap independensi tersebut dapat memperkuat kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan.

Teori hipotesis tersebut didukung oleh Anto et al. (2020) yang menemukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Semakin auditor mempertahankan sikapnya dan tidak terpengaruh dengan orang lain maka kemampuan auditor mendeteksi *fraud* semakin baik pula. Hasil audit yang dikeluarkan juga lebih berkualitas dan dapat dipercaya. Berlandaskan uraian budaya organisasi di atas, dan Berlandaskan beberapa teori tentang persepsi individu terhadap objek tertentu dan hasil penelitian sebelumnya, maka bisa dibuat hipotesis berikut.

H2: Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*

2.4.3. Pengaruh Objektivitas Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud*

Menurut Mulyadi (2002), objektivitas adalah suatu keadaan pikiran yang harus dipertahankan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan orang lain mempengaruhi pendapat auditnya. Prinsip dari objektivitas adalah auditor tidak boleh membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh lain yang tidak patut untuk mengesampingkan pertimbangan profesional. Dengan kata lain, auditor harus bersikap adil dalam apa yang dilakukannya dan tidak terpengaruh oleh apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya. Semakin objektif

seorang auditor maka auditor dapat dengan logis memberikan pertimbangan profesionalnya. Akhirnya, hasil audit yang dikeluarkan akan relevan dan terpercaya. Hasil yang baik menandakan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* baik pula.

Sikap auditor yang tidak gampang dipengaruhi orang lain akan memberikan hasil audit yang baik dan berkualitas. Semakin baik hasil audit yang dikeluarkan maka semakin baik pula kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Hasil yang baik dan berkualitas menandakan bahwa auditor tidak bias

Teori hipotesis tersebut didukung oleh Bimantara & Ngumar (2018) yang menemukan bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Semakin auditor dapat objektif dalam memberikan pendapatnya terhadap hal yang sedang diauditnya maka kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* juga semakin baik. Auditor yang selalu objektif akan lebih mahir dalam membedakan mana yang baik dan buruk. Berlandaskan penjelasan mengenai kompetensi di atas serta didukung adanya beberapa teori mengenai persepsi individu terhadap suatu objek tertentu dan hasil penelitian terdahulu, dirumuskanlah hipotesis berikut:

H3: Objektivitas berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*